

Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran

PENGUATAN KOMPETENSI PENYUSUN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN – BALAI DIKLAT
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH –
23 SEPTEMBER 2024

FASILITATOR

Sumadiyah Triwidiyantino Olfah, S.IKom,M.M.



Pendidikan:

S2 Magister Manajemeni
Universitas Terbuka



Jabatan:

Widyaiswara Ahli Madya
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Kontak:

081381907500
St.olfah@kemenkeu.go.id





POKOK BAHASAN

- Perubahan konsep evaluasi kinerja anggaran (EKA)
- Ruang Lingkup Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Perencanaan Anggaran
- Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja Perencanaan Anggaran
- Pengukuran dan Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran



PMK 62/2023: Sinergi Monev DJA dan DJPB dalam Meningkatkan Kualitas Belanja



Penggabungan Regulasi

Penyempurnaan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam:

1. PMK 22/PMK.02/2021 tentang EKA K/L
2. PMK 204/PMK.02/2021 tentang EKA BUN
3. PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monev PA K/L



Menghilangkan Irisan Penilaian

1. Penyerapan anggaran dan konsistensi RPD menjadi fokus pemantauan di DJPB (Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA)
2. DJA (Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran/EKA) fokus pada efektivitas dan efisiensi



Penguatan Sinergi dan Peran

1. DJA fokus pada aspek perencanaan anggaran
2. DJPB fokus pada aspek pelaksanaan anggaran
3. Hasil monev DJA dan DJPB dipertukarkan dan ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas belanja

Menindaklanjuti Amanat dalam Bab VIII pasal 242 ayat (4) dan pasal 246 ayat (9) PMK 62/2023, perlu disusun KMK terkait ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan PPKA dan EKA perencanaan anggaran.



Pengembangan *Monev* ke Depan



Evaluasi berbasis Spasial

1. Penajaman data lokus
2. Belanja yang sinkron dan saling melengkapi antar sumber pendanaan



Evaluasi Relevansi Output-Outcome

1. Penajaman informasi kinerja lintas sumber pendanaan
2. Pengujian empiris dukungan output terhadap pencapaian outcome



Pentingnya Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Peran, fungsi, dan manfaat evaluasi kinerja anggaran.

01 Peran

Evaluasi berperan penting untuk menghubungkan berbagai indikator-indikator pembangunan sebagai dampak pelaksanaan kebijakan pemerintah

02 Fungsi

Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja :

Proving : Pertanggungjawaban secara profesional kepada *Stakeholder* atas penggunaan anggaran

Improving : meningkatkan **efektivitas, efisiensi dan relevansi Informasi kinerja**, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam rangka peningkatan kinerja dan penyusunan kebijakan.

Manfaat 03

Evaluasi Kinerja Anggaran :

- *Review baseline*
- Alokasi anggaran
- Peningkatan kualitas Informasi kinerja
- Pemberian *Reward & Punishment*



Prinsip *Belanja Berkualitas*



Prinsip Efisiensi

Memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan Keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya.



Prinsip Efektivitas

Memperhatikan ketepatan dan relevansi antara Keluaran yang dihasilkan dengan sasaran Program dan sasaran strategis.



Prinsip Prioritas

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.



Prinsip Transparansi

Menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran kepada pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya dan menyediakan ringkasan informasi bagi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Prinsip Akuntabilitas

Memastikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya



SUBJEK DAN RUANG LINGKUP

Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku PA, dan
Menkeu Selaku
BUN/Pengelola Fiskal

**PPKA
Perencanaan
Anggaran K/L**

**EKA Perencanaan
Anggaran K/L**

Menkeu Selaku
BUN/Pengelola Fiskal

**PPKA
Perencanaan
Anggaran BUN**

**EKA Perencanaan
Anggaran BUN**



PPKA *Perencanaan Anggaran K/L*

(Pengendalian dan Pemantauan Kinerja Anggaran)

1. Periode

- berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan
- sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.

2. Penggunaan

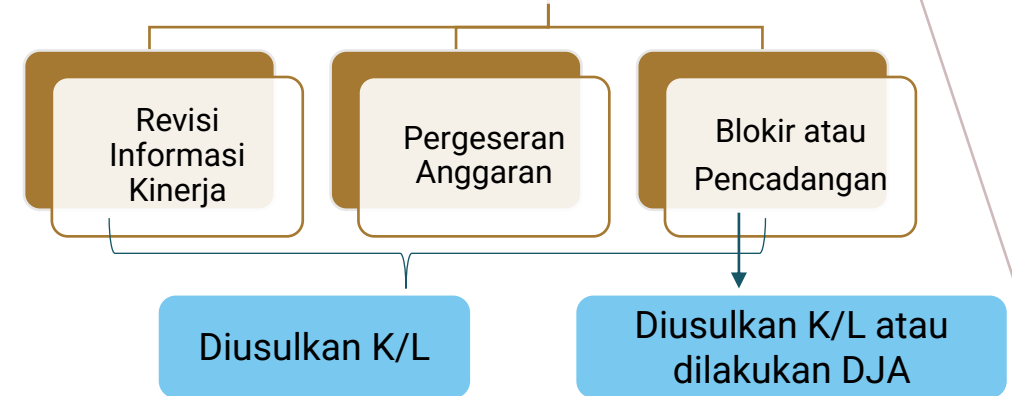
- memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- bahan pertimbangan penyesuaian kebijakan tahun berjalan;
- pengendalian belanja negara; dan
- peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja.

3. Ruang Lingkup

- **Kualitas Informasi Kinerja**
 - Ketersediaan
 - Kejelasan
 - Relevansi
 - Keterukuran
- **Kepatuhan thdp Regulasi Perencanaan Anggaran**
 - Standar biaya
 - Pembatasan alokasi utk belanja tertentu
 - Pengalokasian utk sumber dana tertentu
 - Budget tagging
 - Hasil sinkronisasi belanja pusat-daerah
 - Kebijakan Penganggaran tahun berkenaan

4. Tindak Lanjut

Menkeu melakukan penyesuaian belanja K/L & BUN melalui **Revisi Anggaran**



- revisi informasi kinerja sebagai tindak lanjut atas hasil analisis kualitas informasi kinerja dalam RKA-K/L
- Pergeseran anggaran dilakukan dlm hal:
 - terdapat sisa anggaran pada output yang telah tercapai targetnya; atau
 - terdapat kegiatan yang pelaksanaannya ditunda atau dibatalkan
- Pencadangan/pemblokiran anggaran dilakukan dlm hal:
 - Anggaran yang tidak sesuai ketentuan standar biaya
 - Anggaran yang melanggar pembatasan alokasi untuk belanja tertentu; atau
 - Anggaran tidak sesuai dengan kebijakan penganggaran tahun berkenaan.



PPKA oleh Menkeu selaku BUN/Pengelola Fiskal

Unit	Uraian	Objek	Waktu
Dit.SP	Melakukan PPKA Perencanaan Anggaran K/L secara nasional dan umum berdasarkan parameter tertentu serta fokus yang ditentukan	1. Kualitas informasi kinerja	Triwulan I dan III
		2. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran	
		➢ Standar biaya	sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.
		➢ Hasil sinkronisasi antara Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	Triwulan I
		➢ Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu	
		➢ Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan	Triwulan I, II, dan III
Dit.Abid	Melakukan PPKA Perencanaan Anggaran K/L secara mandiri dan/atau melakukan pendalaman serta menentukan langkah tindak lanjut yang harus diambil atas hasil pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh unit di luar Direktorat Anggaran Bidang sesuai ruang lingkup dan mitra kerjanya masing-masing.	1. Kualitas informasi kinerja	1. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan 2. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.
		2. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran	
		➢ Standar biaya	
		➢ Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu	
		➢ Pengalokasian untuk sumber dana tertentu	
		➢ Penandaan Anggaran (<i>budget tagging</i>)	
		➢ Hasil sinkronisasi antara Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	
➢ Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan			
Direktorat PAPBN	Melakukan PPKA Perencanaan Anggaran K/L atas pelaksanaan APBN tahun berjalan terhadap perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan/atau kebijakan makro fiskal yang bersifat strategis lainnya, dengan mengamati perkembangan, mengidentifikasi, mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.	1. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran	1. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan 2. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.
		➢ Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan	



PPKA oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA

Tingkatan/ Unit Penganggungjawab	Objek		Waktu
	Kualitas Informasi Kinerja	Kepatuhan Terhadap Regulasi Perencanaan Anggaran	
Tingkatan: Kementerian/Lembaga Unit Penganggungjawab: Eselon I yang menangani bidang kesekretariatan pada setiap Kementerian/Lembaga.	Memastikan ketersediaan, kejelasan, keterukuran, dan relevansi informasi kinerja atas: 1. Seluruh indikator kinerja sasaran strategis pada Kementerian/Lembaga tersebut; 2. Seluruh indikator kinerja program unit eselon I di bawah kewenangannya; dan 3. Seluruh rincian output satker di bawah kewenangannya;	Melaksanakan PPKA Perencanaan Anggaran atas seluruh komponen kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran atas seluruh kegiatan di Kementerian/Lembaga tersebut	1. berkala dan menyeluruh sesuai dengan periode aktivitasnya; dan 2. sepanjang proses dalam siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.
Tingkatan: Unit Eselon I Unit Penganggungjawab: Unit Eselon I sebagai pengelola program	Memastikan ketersediaan, kejelasan, keterukuran, dan relevansi informasi kinerja atas: 1. Seluruh indikator kinerja program pada unit eselon I tersebut; dan 2. Seluruh rincian output satker di bawah kewenangannya.	Melaksanakan PPKA Perencanaan Anggaran atas seluruh komponen kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran atas seluruh kegiatan di Unit Eselon I tersebut	
Tingkatan: Satker Unit Penganggungjawab: Satker sebagai pengelola kegiatan	Memastikan ketersediaan, kejelasan, keterukuran, dan relevansi informasi kinerja atas seluruh rincian output pada satker tersebut.	Melaksanakan PPKA Perencanaan Anggaran atas seluruh komponen kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran atas seluruh kegiatan di Satker tersebut	



EKA *Perencanaan Anggaran K/L*

(Evaluasi Kinerja Anggaran)

1. Periode

Untuk TA yang telah selesai

2. Fungsi

- Akuntabilitas
- Peningkatan kualitas

3. Pihak lain yg terlibat

- Akademisi
- Pakar
- Praktisi, dan
- Lembaga internasional

4. Aktivitas

- Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran K/L
- Evaluasi Kinerja Anggaran Tematik

Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran K/L

- **Efektivitas**
 - Capaian RO dikaitkan dengan IKP & ISS
 - Capaian IKP
 - Capaian ISS
- **Efisiensi > Implementasi SBK**
 - Penggunaan SBK
 - Efisiensi SBK

Evaluasi Kinerja Anggaran Tematik

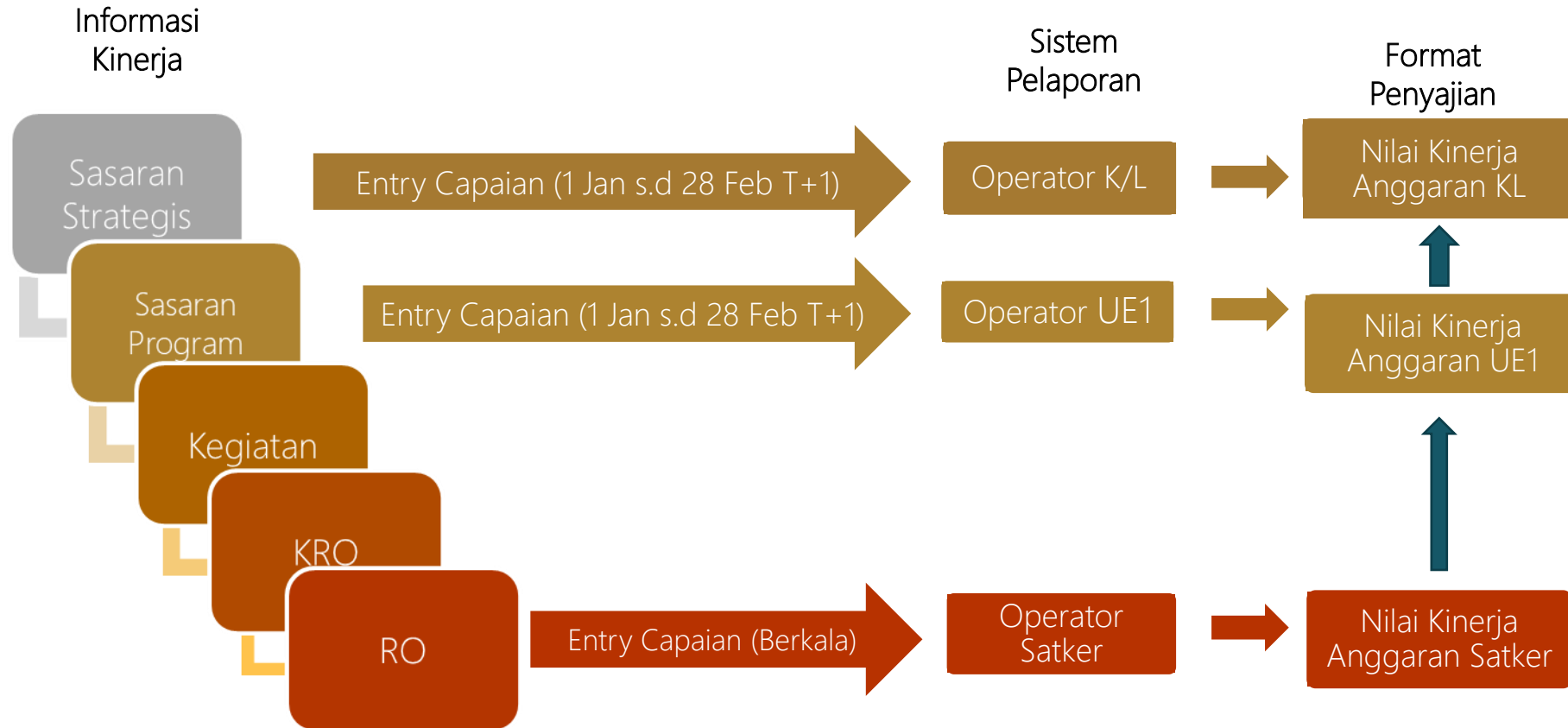
- Persiapan
- Pengumpulan Data
- Analisis
- Penyusunan Rekomendasi
- Pelaporan

Peranan masing-masing UE2 DJA dalam Evaluasi Tematik

No	Unit	Peran (Evaluasi Tematik)
1	Dit. PAPBN	<ol style="list-style-type: none"> melaksanakan EKA Tematik K/L dalam rangka penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional melaksanakan EKA Tematik K/L dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2	Dit. Abid	<p>Direktorat Anggaran Bidang dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan EKA Tematik K/L dalam rangka penyusunan reviu angka dasar; melaksanakan EKA Tematik K/L dalam rangka penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/ atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan; dan melaksanakan EKA Tematik K/L dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3	Dit.SP	melaksanakan EKA Tematik K/L dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KEWAJIBAN PELAPORAN KINERJA

Dalam rangka evaluasi dan penilaian kinerja perencanaan anggaran





*PENGUKURAN &
PENILAIAN KINERJA
PERENCANAAN
ANGGARAN K/L*



PERUBAHAN PENILAIAN KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN K/L

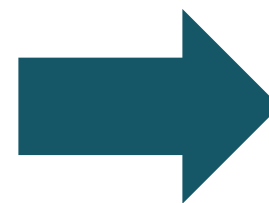
Semula

Tingkat K/L

Tingkat Eselon I

Tingkat Satker

Menjadi



1. Penyerapan anggaran dan konsistensi RPD menjadi fokus pemantauan di DJPB (IKPA)
2. Penilaian DJA fokus pada efektivitas dan efisiensi

NK K/L
100%

Aspek Manfaat (Sasaran Strategis) 50% Rata-Rata NK Es.I 50%

NK Manfaat dan Implementasi Es I 50%

Rata-Rata NK Satker 50%

Aspek Manfaat (Sasaran Program) 66,7%

Aspek Implementasi Es. I 33,3%

Capaian RO 43,5%

Efisiensi 28,6%

Konsistensi Penyerapan Anggaran thd Perencanaan 18,2%

Penyerapan Anggaran 9,7%

Aspek Implementasi

NK K/L

Capaian Sasaran Strategis

Kinerja Unit Eselon I

Capaian Sasaran Program

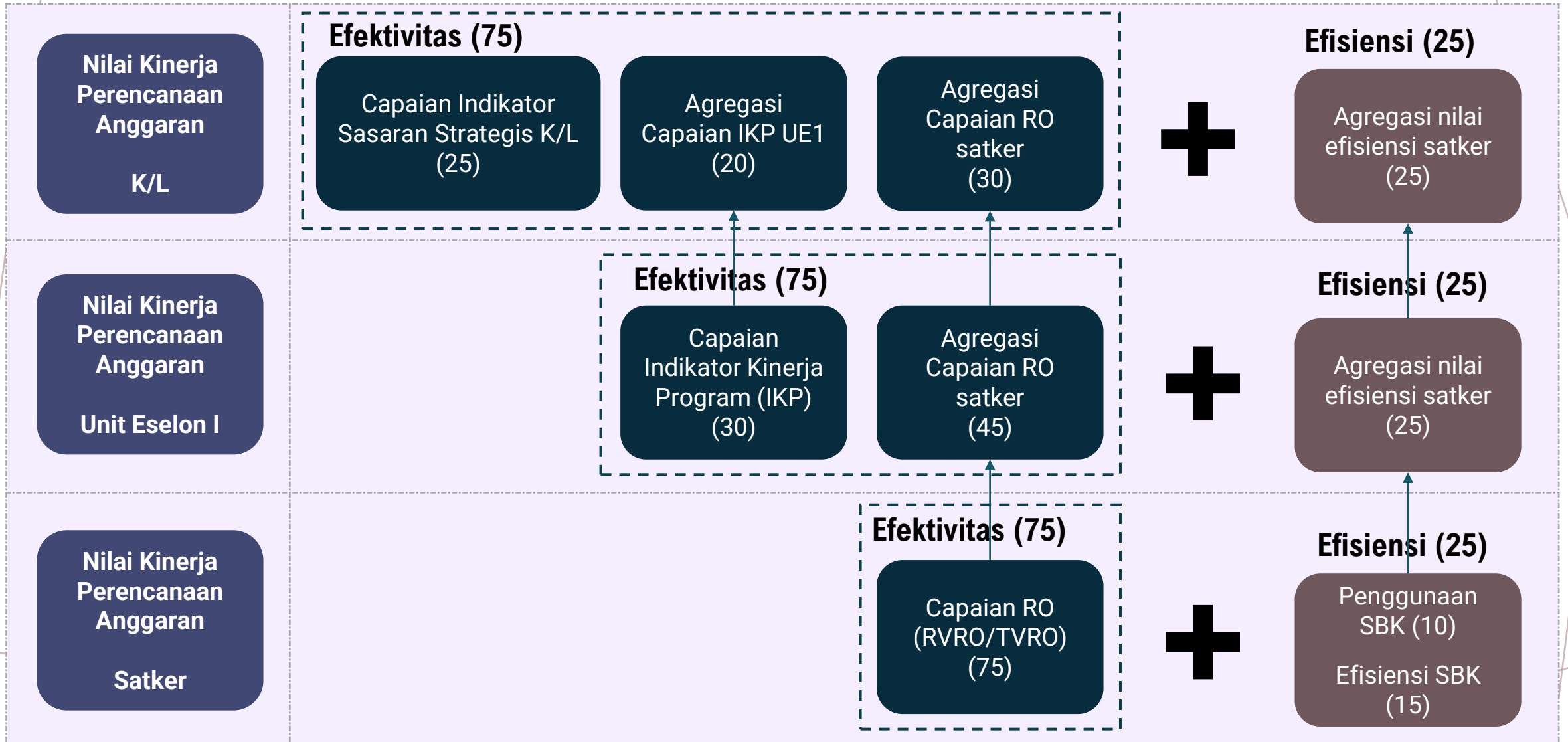
Kinerja Satker

Efektivitas: Capaian RO

Efisiensi: Implementasi SBK



Rincian Baru Bobot Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran





Penilaian Kinerja akan Mendorong Implementasi SBK

Nilai Efisiensi Satker

1. Penggunaan SBK (Jika indeks biaya RO dalam PMK SBK **LEBIH DARI/SAMA DENGAN** indeks biaya RO antara realisasi anggaran dibagi realisasi volume RO)

Menghitung Jumlah RO yang memenuhi kondisi berikut:

$$\text{Indeks dalam PMK SBK} \geq \frac{\text{Penyerapan Anggaran di RO}}{\text{Realisasi Volume RO}}$$

- DJA akan melakukan pemetaan atas RO yang memenuhi kriteria SBKU terlebih dahulu sebelum menilai penggunaan SBKU menggunakan formula di atas

2. Efisiensi SBK (Jika indeks biaya RO dalam PMK SBK **LEBIH DARI** indeks biaya RO antara realisasi anggaran dibagi realisasi volume RO)

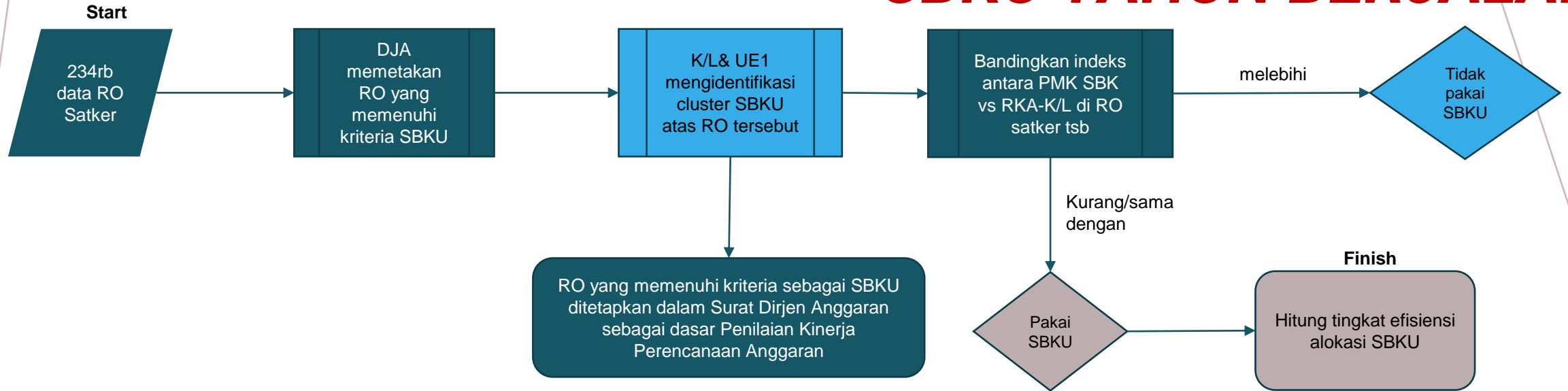
Menghitung tingkat efisiensi pada RO SBK dengan formula sebagai berikut

$$\text{Indeks dalam PMK SBK} > \frac{\text{Penyerapan Anggaran di RO}}{\text{Realisasi Volume RO}}$$

- Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% dan paling kecil 0%.
- Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%.
- Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%.



DJA AKAN MELAKUKAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN SBKU TAHUN BERJALAN



Contoh

Kode gabungan	Cek SBKU Link	Rincian Output	Satuan
00101WA10	0	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Interna	Layanan
00101WA10	0	Layanan Umum	Layanan
00101WA10	0	Layanan Bantuan Hukum	Layanan
00101WA10	0	Layanan Manajemen SDM	Orang
00101WA10	0	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang
00101WA10	0	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen
00101WA10	0	Layanan Hubungan Masyarakat	Laporan
00101WA10	0	Layanan Data dan Informasi	Layanan
00101WA10	0	Layanan Perkantoran	Layanan
00101WA10	1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen
00101WA10	1	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen

Secara nomenklatur RO tersebut memenuhi kriteria SBKU, namun perlu ditetapkan cluster dan sub-clusternya agar dapat membandingkan indeks biaya antara PMK SBK vs RKAKL

a. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon I		
1) 20 s.d 40 satker	1 Dokumen	552.500.000
2) di atas 40 satker	1 Dokumen	810.400.000
b. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Kementerian/Lembaga (K/L)		
1) 1 s.d 6 unit	1 Dokumen	9.000.000
2) di atas 6 unit	1 Dokumen	185.000.000



Semula

- Sebelumnya, pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan nilai tertinggi variabel EKA, PBB dan IKPA.
- EKA dibobot 60% sedangkan IKPA dibobot 40%
- Nilai gabungan EKA- IKPA di-ranking berdasarkan kategori K/L pagu besar, pagu sedang, dan pagu kecil

Menjadi

Skema Baru Kebijakan Pemberian Penghargaan & Pengenaan Sanksi

Rekap

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) =
Perencanaan Anggaran (50%) +
Pelaksanaan Anggaran (50%)

Passing Grade

K/L yang memperoleh NKA yang SANGAT BAIK dan bagi K/L yang memiliki tusi PPB memperoleh nilai Sangat Baik lolos menjadi kandidat K/L yang akan diberi insentif

Insentif

1. 3 K/L dengan kinerja pengelolaan PNBPN terbaik
2. 3 K/L dengan nilai Sinkronisasi Belanja K/L dan TKD terbaik
3. 3 K/L dengan Proporsi Penggunaan PDN terbesar



PASSING GRADE DALAM REWARD & PUNISHMENT MENGGESER PARADIGMA PENILAIAN KINERJA AKHIR TAHUN



Semula: Tampilan nilai skala 1-100

Unit Eselon I	Nilai Kinerja Anggaran
Unit Eselon I - A	95,29
Unit Eselon I - B	96,95
Unit Eselon I - C	98,56
Unit Eselon I - D	94,67
Unit Eselon I - E	96,38
Unit Eselon I - F	97,81
Unit Eselon I - G	94,86
Unit Eselon I - G	97,15
Unit Eselon I - H	96,09
Unit Eselon I - I	97,66
Unit Eselon I - J	98,32



Menjadi: Tampilan Kategori Kualitatif

Unit Eselon I	Nilai Kinerja Anggaran
Unit Eselon I - A	Sangat Baik / 5
Unit Eselon I - B	Sangat Baik / 5
Unit Eselon I - C	Sangat Baik / 5
Unit Eselon I - D	Sangat Baik / 5
Unit Eselon I - E	Sangat Baik / 5
Unit Eselon I - F	Sangat Baik / 5
Unit Eselon I - G	Sangat Baik / 5
Unit Eselon I - G	Sangat Baik / 5
Unit Eselon I - H	Sangat Baik / 5
Unit Eselon I - I	Sangat Baik / 5
Unit Eselon I - J	Sangat Baik / 5

Konversi kategori penilaian dalam PMK 62/2023

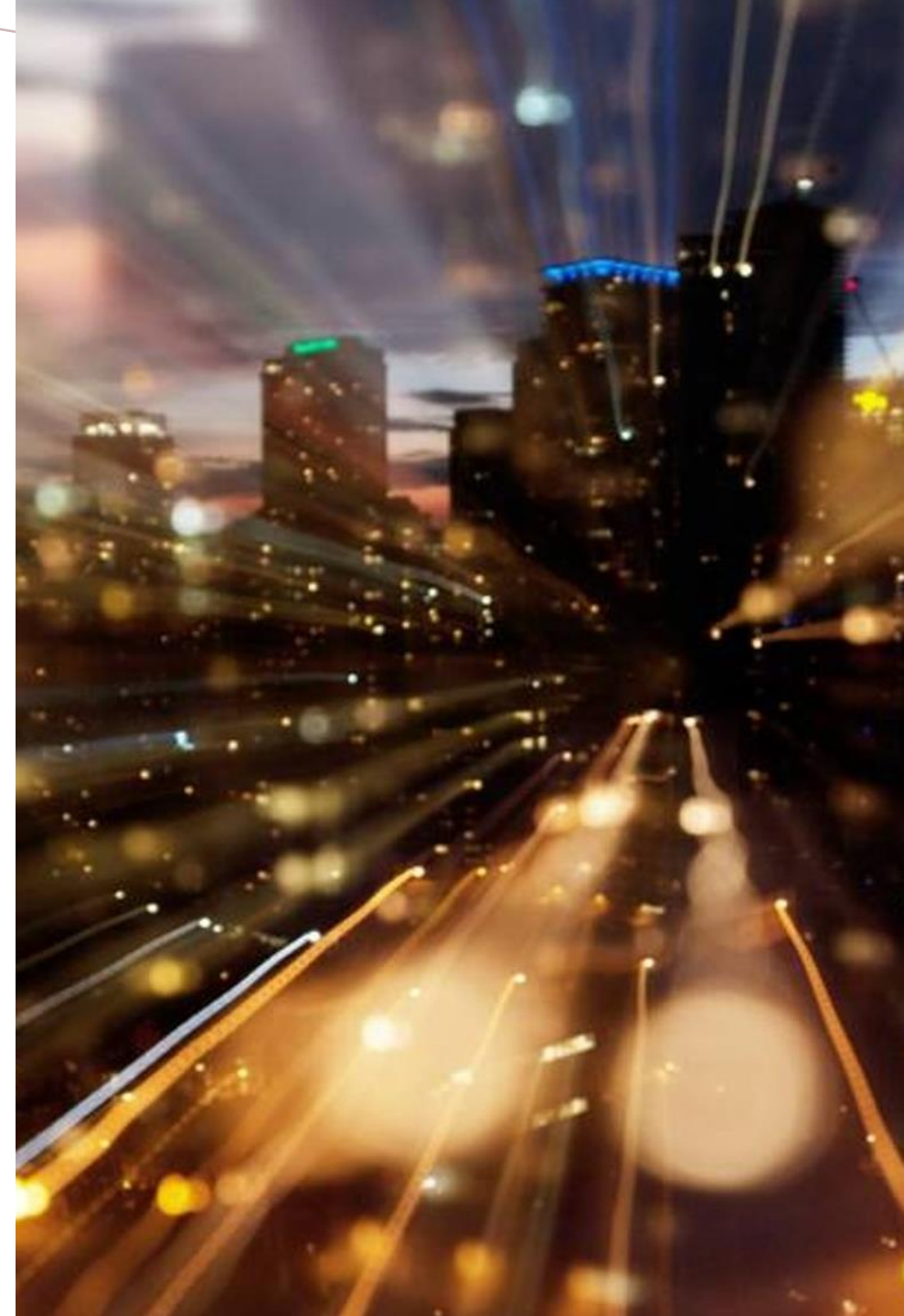
Nilai	Kategori	Konversi
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50 s.d 60	Kurang	2
60 s.d 80	Cukup	3
80 s.d 90	Baik	4
90 s.d 100	Sangat Baik	5

Keterangan:

- Perubahan paradigma dilakukan agar K/L-Unit-Satker tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga pada *pending matters* dan perbaikan berkelanjutan.
- K/L-Unit-Satker yang telah berkinerja Sangat baik (NKA>90) cukup mempertahankan kategori nilainya

DISKUSI

Bagaimana Strategi untuk mendapatkan nilai kinerja anggaran yang paling optimal?



TERIMA KASIH

